



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI KUPANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AFRIZAL RIYADI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 1029567

II. DATA HARTA

| | | |
|--|------------|----------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 1.137.838.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/113 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.137.838.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 37.200.000 |
| 1. MOTOR, VESPA LXV 150 IE SCOOTER Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000 | | |
| 2. MOTOR, SUZUKI SKYWAVE 125 CC SCOOTER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.300.000 | | |
| 3. MOTOR, HONDA BEAT 110 CC SCOOTER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000 | | |
| 4. MOTOR, HONDA TIGER REVO SPORT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.900.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | ---- |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 19.500.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 1.194.538.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 804.920.267 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 389.617.733 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.